

Jurnal Spasial
Volume 6, Nomor 1, April, 2019

MENAPAKI TANGGA ARNSTEIN DALAM PERENCANAAN TATA RUANG (STUDI KASUS KECAMATAN AUA BIRUGO TIGO BALEH KOTA BUKITTINGGI)

Penulis : Liza Sandra Dewi, Firwan Tan, M. Nazer

Sumber : Volume 6, Nomor 1, April, 2019

Diterbitkan Oleh : Program Studi Pendidikan Geografi, STKIP PGRI Sumatera Barat

Untuk Mengutip Artikel ini :

Dewi, Liza Sandra. 2019. Menapaki Tangga Arnstein dalam Perencanaan Tata Ruang (Studi Kasus Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi). Jurnal Spasial, Volume 6, Nomor 1, bulan April, 2019: 19-26.

Copyright © 2019, Jurnal Spasial
ISSN: 2540-8933 EISSN: 2541-4380

Program Studi Pendidikan Geografi
STKIP PGRI Sumatera Barat



MENAPAKI TANGGA ARNSTEIN DALAM PERENCANAAN TATA RUANG (STUDI KASUS KECAMATAN AUA BIRUGO TIGO BALEH KOTA BUKITTINGGI)

Liza Sandra Dewi¹ Firwan Tan² M. Nazer³

¹Perencanaan Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas,

²Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas

³Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas

ARTIKEL INFO

Article history:

Submit 2019-04-15

Editing 2019-05-07

Keyword:

citizen participation,

Spatial Planning,

Arnstein Ladder

ABSTRACT

Spatial planning is a system related to the process of planning, utilizing and controlling spatial use which aims to improve citizens' welfare. It's a social process that must involve citizen as the ultimate goal which impacted by the planning. Purpose of this study is to measure the level of citizen participation in the spatial planning of Bukittinggi. The research location was in the District of Aua Birugo Tigo Baleh (ABTB). it was chosen because it experienced significant changes in spatial plans, and some rejection and dissatisfaction from the people coming from this district, including changes in the Tambuo area from public service functions to trade and service areas. This study uses primary data by distributing questionnaires and in-depth interviews with citizens who directly involved in the spatial planning process. The method used is descriptive qualitative analysis using the Arnstein typology model. The results show that the level of citizen participation is still at the level of tokenism, the fourth ladder, consultation. These results are still far from the expected maximum participation conditions as mandated in PP No. 68 of 2010 about the form and procedure of the role of the community in spatial planning.

Penataan ruang dan wilayah merupakan suatu sistem terkait proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua ini merupakan suatu proses sosial yang harus melibatkan masyarakat yang menjadi tujuan akhir dan bagian yang terdampak oleh perencanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang dan wilayah kota Bukittinggi. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh (ABTB). Pemilihan kecamatan ABTB dikarenakan kecamatan ini mengalami perubahan yang cukup signifikan pada perubahan RTRW tersebut, dan beberapa penolakan serta ketidakpuasan masyarakat muncul dari kecamatan ini, diantaranya perubahan kawasan tambuo dari kawasan fungsi pelayanan umum menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebar kuesioner dan indepth interview dengan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses penyusunan RTRW. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model tipologi arnstein. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat masih berada pada level tokenisme, tangga keempat, yaitu konsultasi. Hasil ini masih jauh dari kondisi partisipasi maksimal yang diharapkan seperti yang diamanatkan dalam PP Nomor 68 Tahun 2010 mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang.

©2019 Jurnal Spasial All rights reserved.

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan suatu proses alami yang selalu terhubung dengan kehidupan manusia, baik secara individu ataupun sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dalam memilih alternatif-alternatif cara untuk mencapai tujuan. Elliott (2014) menyatakan perencanaan merupakan suatu proses, prosedur dan metode dalam

mencapai tujuan, mengidentifikasi dan menilai pilihan-pilihan, dan pengembangan strategi mencapai pilihan-pilihan yang diinginkan. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih kompleks, ini bukan lagi sebagai proses naluriah yang bisa dijalankan manusia secara alami namun sudah berkembang menjadi suatu bidang ilmu yang bisa dibentuk dan dikembangkan dari multi disiplin ilmu lainnya.

Begitu juga dalam hal pengaturan penggunaan ruang, perencanaan tata ruang merupakan suatu proses sosial, yang bukan hanya berfokus kepada pembangunan fisik saja, tapi harus melibatkan manusia yang terdapat didalamnya yang berhak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Masyarakat berhak terlibat dalam menentukan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung (Involve, 2005).

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses berbasis komunitas, dimana warga negara terlibat secara langsung dalam proses perencanaan terutama dalam masalah yang berhubungan langsung dengan mereka. Keterlibatan warga dalam perencanaan dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik, sehingga lebih efisien dan lebih banyak manfaat yang diterima masyarakat. *The Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial / Regional Planning* (CEMAT, 2014) menyatakan perencanaan partisipatif merupakan bentuk spesifik dari kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan tersebut. Partisipasi tidak hanya sebagai kebutuhan dasar, tapi merupakan bagian dari hak asasi manusia (Cornwall, 2002).

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai dasar hukum partisipasi masyarakat dalam penataan ruang yang dijabarkan dalam pasal 65 ayat (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dalam PP Nomor 68 Tahun 2010 diatur mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang, dijelaskan bahwa peran masyarakat disini adalah merupakan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Partisipasi aktif masyarakat dalam penataan ruang ini bertujuan untuk :

1. Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang.
2. Mewujudkan pelaksanaan penataan yang transparan, efektif, akuntabel dan berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan bidang penataan ruang.

Munculnya berbagai permasalahan dalam tata ruang merupakan implikasi dari tidak dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam penyusunan tata ruang tersebut. Partisipasi masyarakat berperan penting dalam menentukan kesesuaian tataruang dalam pembangunan kota kedepannya dan tentunya kebutuhan masyarakat itu sendiri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2013) tentang masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang dan wilayah di daerah Lhokseumawe yang membawa dampak kepada adanya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta. Begitu juga dengan yang terjadi di Kota Bukittinggi, adanya reaksi penolakan masyarakat setelah disyahnkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030 merupakan suatu gambaran dari terpinggirkannya aspirasi masyarakat.

Dampak dari penyimpangan pemanfaatan ruang dan penolakan terhadap tata ruang ini akan berujung kepada direvisinya rencana tata ruang dan wilayah. Selain melalui prosedur yang cukup panjang, dana yang dibutuhkan juga terbilang cukup besar dalam penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah ini.

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh merupakan salah satu kecamatan yang mengalami dampak cukup signifikan dalam perubahan RTRW kota Bukittinggi di Tahun 2017. Beberapa penolakan pun terjadi atas perubahan ini, diantaranya adalah penolakan terhadap perubahan yang terjadi di kawasan Tambuo yang sebelumnya merupakan kawasan dengan fungsi pelayanan umum menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Dari survey awal didapati ketakutan akan masuknya pelaku-pelaku ekonomi besar yang akan menguasai perekonomian di Bukittinggi akan menyebabkan tersingkirnya penduduk asli dan Usaha Kecil Menengah menjadi sebab dari penolakan ini.

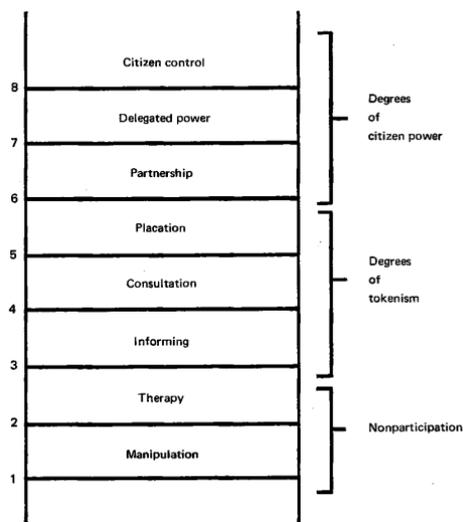
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai "Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh?". Dengan diketahuinya tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan ABTB dalam penyusunan RTRW, diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan bagi kegiatan yang sama kedepannya.

METODOLOGI

Penelitian ini digolongkan penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal apa adanya. Hasan (2002) menjelaskan metode ini untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik populasi secara aktual dengan menitik beratkan pada observasi alamiah. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara dengan tokoh masyarakat Kecamatan ABTB yang terlibat langsung dalam pelaksanaan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bukittinggi 2010-2030. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Biro Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi.

Model yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat adalah tipologi Arnstein. Arnstein (1969) menyatakan "*Citizen Participation is Citizen Power*", partisipasi masyarakat merupakan kekuatan dari masyarakat yang dapat dijabarkan melalui perbedaan tingkatan dalam pendistribusian kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah. Pola ini dikembangkan dalam bentuk tangga partisipasi yang terdiri dari delapan anak tangga yang terbagi atas tiga bagian. Seperti terlihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1. Tangga partisipasi Arnstein



1. Bagian Pertama merupakan Tahapan Non Partisipasi

- Tangga pertama adalah Manipulasi, dimana pada tahapan ini masyarakat dikumpulkan oleh Pemerintah bukan untuk tujuan melibatkan mereka dalam suatu perencanaan ataupun program, tapi sebagai wahanan untuk mendidik dan mencari dukungan. Dalam hal ini tidak terjadi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
- Tangga kedua adalah Terapi, dimana dalam hal ini peran serta masyarakat bukan menjadi fokus utama bagi pemerintah. Pada level ini sudah terjadi komunikasi satu arah dari Pemerintah ke masyarakat yang bersifat terbatas

2. Bagian Kedua Merupakan Derajat Tokenisme

Pada bagian ini masyarakat memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, tapi tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat masih sangat kecil pada bagian ini. Partisipasi dalam tingkatan ini tidak lebih dari suatu simbolis dalam mencapai tujuan.

c. Tangga ketiga adalah Informasi

Pada tangga ini masih didominasi komunikasi satu arah, dimana pemerintah masih bersifat sebagai pemberi informasi kepada masyarakat tanpa ada kesempatan untuk memberikan umpan balik. Oleh karena itu masyarakat belum mempunyai kekuatan dalam pengambilan keputusan akhir.

d. Tangga keempat adalah Konsultasi, dalam tingkatan ini sudah terjadi komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah, tapi masih hanya bersifat seremonial. Tapi tidak ada jaminan dalam hal ini umpan balik yang diberikan masyarakat akan dapat memberikan perubahan terhadap keputusan yang akan diambil.

e. Tangga kelima adalah Penentraman atau Placation, pada tahapan ini komunikasi sudah berjalan baik antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat berhak memberikan pendapat dan terlibat dalam perencanaan, tapi wewenang dalam penilaian kelayakan terhadap suatu rencana atau program tetap berada pada pihak pemerintah.

3. Bagian Ketiga merupakan Kekuatan Masyarakat

Tiga tangga terakhir merupakan gambaran dari bentuk tertinggi partisipasi masyarakat

- f. Tangga keenam adalah kemitraan, dimana pada tahapan ini masyarakat dan pemerintah merupakan mitra. Masyarakat berhak untuk melakukan negoisasi dengan pemerintah baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi. Keputusan diambil berdasarkan hasil komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
- g. Tangga ketujuh adalah Pendelegasian, dimana pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus beberapa kepentingannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Terapat gambaran kekuasaan dan tanggungjawab masyarakat dengan jelas dalam suatu program. Dimana dalam hal ini masyarakat diwakili oleh suatu badan perwakilan dalam mencapai keinginan mereka.
- h. Tangga kedelapan yang merupakan bagian tertinggi dalam partisipasi adalah Pengendalian Warga, dimana pada tingkatan ini warga diberi keweangan sepenuhnya dalam mengelola kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka tanpa campur tangan pemerintah. Masyarakat sudah sampai pada tahapan pengawasan yang berhak menyampaikan teguran secara langsung jika terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Tingkat partisipasi masyarakat dianalisis berdasarkan skoring terhadap pertanyaan dalam bentuk kuesioner kedalam delapan tangga pada tipologi Arnstein. Dalam tahap ini terdapat empat kriteria pertanyaan dengan masing-masing delapan pilihan skor (mewakili delapan tangga tipologi Arnstein) dengan skor diantara 1 hingga 8. N merupakan jumlah responden yang menjawab, B merupakan bobot penilaian dan T adalah perkalian dari bobot dan jumlah responden. Dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang, maka skor minimum yang diperoleh adalah 30, dan skor maksimum yang bisa diperoleh adalah 240 (30x8), maka dari skor maksimum dan minimum akan diperoleh jarak interval masing-masing tangga, yaitu $(240-30)/8 = 26$.

Tabel.2 Perhitungan tangga Arnstein

Non Partisipasi		Tokenisme			Kekuatan Masyarakat		
Manipulasi	Terapi	Informasi	Konsultasi	Plakasi	Kemitraan	Pendelegasian	Pengendalian Warga
30-56	56-83	83-109	109-135	135-161	161-187	187-213	213-240

Sumber: Pengolahan data Survei, 2019

Penelitian ini hanya dibatasi untuk melakukan penilaian tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang dan wilayah kota Bukittinggi, dengan melihat kepada variabel (Suciati, 2006):

- 1) Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan
- 2) Keaktifan dalam mengemukakan masukan/saran/usul
- 3) Keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana
- 4) Keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana

PEMBAHASAN

1. Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan

Tabel 3. Partisipasi kehadiran masyarakat dalam pertemuan

No	Pertanyaan	N	B	T
1	Hadir hanya untuk memenuhi undangan.	-	1	0
2	Hadir memenuhi undangan dan sebagai pendengar.	-	2	0
3	Hadir hanya memperoleh informasi	4	3	12
4	Hadir untuk memperoleh informasi dan menyampaikan beberapa pendapat, tapi pendapat tidak diperhitungkan	13	4	52

5	Hadir untuk menyampaikan pendapat, tapi hanya sedikit yang diperhitungkan	5	5	25
6	Hadir untuk melakukan dialog/tanya jawab dengan pemerintah, dan usulan yang diberikan diperhitungkan dalam penyusunan rencana.	8	6	48
7	Hadir dan mendapat tanggung jawab dan kewenangan dalam penyusunan rencana	-	7	0
8	Hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.	-	8	0
Jumlah		30		137

Sumber: Pengolahan data Survei, 2019

Dari tabel. 3 terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pertemuan adalah 138, yang merupakan perkalian dari jumlah responden dan bobot dari masing-masing pertanyaan. Tabel diatas juga menunjukkan 43% dari responden hadir untuk memperoleh informasi dan menyampaikan beberapa pendapat, walaupun mereka tidak yakin apakah pendapat mereka akan diperhitungkan atau tidak. Dari skoring tangga arnstein, tingkat kehadiran masyarakat berada pada level tokenisme yaitu tangga kelima, plakasi.

2. Keaktifan dalam mengemukakan masukan/saran/usul

Tabel 4. Partisipasi masyarakat dalam mengemukakan masukan/saran/usul dalam pertemuan

No	Pertanyaan	N	B	T
1	Tidak memberikan masukan/saran/usul.	2	1	2
2	Memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja.	-	2	0
3	Memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat.	6	3	18
4	Memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah.	15	4	60
5	Memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai dengan kebutuhan	4	5	20
6	Memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah.	3	6	18
7	Memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.	-	7	0
8	Memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana	-	8	0
Jumlah		30		118

Sumber: Pengolahan data Survei, 2019

Dari tabel. 4 terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mengemukakan masukan/saran dan usul dalam pertemuan adalah 118, yang merupakan perkalian dari jumlah responden dan bobot dari masing-masing pertanyaan. Tabel diatas juga menunjukkan 50% dari responden hadir dan melakukan dialog dua arah dengan pemerintah, tidak ada jaminan usulan dan pendapat mereka akan memberi pengaruh keputusan yang akan diambil. Dari skoring tangga arnstein, tingkat kehadiran masyarakat berada pada level tokenisme yaitu tangga keempat, konsultasi.

3. Keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana

Tabel 5. Partisipasi masyarakat dalam menetapkan konsep rencana

No	Pertanyaan	N	B	T
1	Tidak ikut menetapkan konsep rencana, semua sudah ditetapkan oleh pemerintah	2	1	2
2	Konsep rencana sudah ditetapkan oleh pemerintah dan beberapa rancangan yang disampaikan, dan tidak ada dialog untuk menanggapi.	4	2	8
3	Konsep rencana sudah ditetapkan oleh pemerintah dan semua sudah disampaikan, tapi masih tidak ada dialog untuk menanggapi.	6	3	18
4	Ikut berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana, walaupun tidak ada jaminan akan diterima	12	4	48
5	Ikut menetapkan berperan aktif menetapkan konsep rencana, namun tetap dinilai kelayakannya oleh pemerintah.	5	5	25
6	Ikut menetapkan konsep rencana dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah.	1	6	6
7	Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.	-	7	0
8	Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.	-	8	0
	Jumlah	30		107

Sumber: Pengolahan data Survei, 2019

Dari tabel. 5 terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan konsep rencana adalah 107, yang merupakan perkalian dari jumlah responden dan bobot dari masing-masing pertanyaan. Tabel diatas juga menunjukkan 40% dari responden hadir dan ikut berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana, walaupun tidak ada jaminan konsep yang mereka usulkan akan diterima. Dari skoring tangga arnstein, tingkat kehadiran masyarakat berada pada level tokenisme yaitu tangga ketiga, informasi.

4. Keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana

Tabel 6. Partisipasi masyarakat dalam persetujuan rancangan rencana

No	Pertanyaan	N	B	T
1	Tidak memberikan persetujuan.	3	1	3

2	Memberikan persetujuan tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.	-	2	0
3	Memberikan persetujuan karena untuk kepentingan masyarakat.	13	3	39
4	Memberikan persetujuan karena telah terjadi dialog dua arah dengan pemerintah.	7	4	28
5	Memberikan persetujuan karena usulan dari masyarakat diperhatikan.	4	5	20
6	Memberikan persetujuan karena telah ada kesamaan kepentingan dengan pemerintah.	3	6	18
7	Memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.	-	7	0
8	Memberikan persetujuan setelah diberi kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana	-	8	0
	Jumlah	30		108

Sumber: Pengolahan data Survei, 2019

Dari tabel. 6 terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam persetujuan rancangan rencana adalah 108, yang merupakan perkalian dari jumlah responden dan bobot dari masing-masing pertanyaan. Tabel diatas juga menunjukkan 43% dari responden memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana, mengingat pentingnya rancangan tersebut untuk kepentingan masyarakat. Dari skoring tangga arnstein, tingkat kehadiran masyarakat berada pada level tokenisme yaitu tangga ketiga, informasi.

Dari keempat tabel diatas, didapat akumulasi tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan:

Tabel 7. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bukittinggi (Studi kasus Kecamatan ABTB)

No	Bentuk Partisipasi	Skor		Hasil
1	Kehadiran	137	Plakasi	Tokenisme
2	Saran/masukan/pendapat	118	Konsultasi	Tokenisme
3	Penetapan konsep	107	Informasi	Tokenisme
4	Persetujuan rancangan	108	Informasi	Tokenisme
	Rata-Rata	117.5	Konsultasi	Tokenisme

Sumber: Pengolahan data Survei, 2019

Dari tabel 7 diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2017 Studi kasus Kecamatan ABTB berada pada level tokenisme, yaitu tangga keempat, yaitu konsultasi. Dimana pada tingkatan ini sudah terjadi komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah, tapi masih hanya bersifat seremonial, tidak ada jaminan umpan balik yang diberika masyarakat akan dapat memberikan perubahan terhadap keputusan yang akan diambil.

PENUTUP

Dari penilaian tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW masih belum berada pada tingkatan yang diharapkan. Dari penelitian ini terlihat bahwa partisipasi masyarakat belum berjalan dengan baik. Hasil analisis dengan menggunakan model tipologi Arnstein pada setiap tahapan dalam proses penyusunan RTRW masih berada pada level tokenisme. Dan secara keseluruhan partisipasi masyarakat berada pada anak tangga keempat, konsultasi,

dimana komunikasi antara masyarakat sudah terjadi walaupun hasil dari komunikasi dua arah ini tidak menjamin akan adanya perubahan terhadap keputusan yang akan diambil.

Dengan penyusunan program partisipasi yang menarik akan dapat mengatasi masalah apatisme dan ketidaktertarikan warga dalam proses perencanaan. program partisipasi akan membuka proses berbagi informasi, wawasan dan pengaruh, dan memastikan bahwa perencanaan yang telah disetujui dapat diimplementasikan tidak hanya oleh lembaga publik, tapi juga oleh pihak swasta dan warga negara yang telah menjadi bagian nyata dari proses terbentuknya perencanaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35:4, 216-224.
- CEMAT. 2014. *A Handbook on Territorial Democracy and Public Participation in Spatial Planning (A Handbook for European Institution, Actors and Participators)*. Council of Europe.
- Cornwall, Andrea. 2002. *Beneficiary, Consumer, Citizen: Perspective on Participation for Poverty Reduction*. Gothenburg: Ellanders Novum.
- Elliot, Michael. 2014. *History and Theories of Planning (Why we do What we do?)*. School Of City and Regional Planning, Georgia Tech.
- Faisal, dkk. 2013. Analisis Partisipasi masyarakat Lholseumawe dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Lhokseumawe. *Jurnal Teknik Sipil Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2 No. 1 Februari 2013*.
- Hasan, MC. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Involve. 2005. *People and Participation : How to Put Citizens at the Heart of Decisiion-Making*. London: Beacon Press.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bukittinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- Suciati. 2006. *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Tentang Penataan Ruang*.